

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup banyak. Di Indonesia sendiri ada daerah yang juga memiliki cukup tinggi jumlah angka kemiskinan yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Walaupun Yogyakarta memiliki beragam budaya dan pesona alam yang indah dan menjadikan Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota pariwisata di Indonesia yang banyak dikunjungi oleh pengunjung mancanegara maupun pengunjung internasional. Tetapi dibalik itu semua Yogyakarta juga mempunyai masalah kependudukan yang parah yaitu masalah kemiskinan yang tergolong tinggi karena masih banyaknya penduduk miskin di Kota Yogyakarta. Memang untuk saat ini kemiskinan merupakan salah satu masalah yang cukup besar di alami oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, bagaimana tidak untuk saat ini Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa.

Table 2.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta, 2013-2017

Kabupaten/kota	2013	2014	2015	2016	2017
Kulon Progo	21,39	20,64	21,40	20,30	20,03
Bantul	16,48	15,89	16,33	14,55	14,07
Gunungkidul	21,70	20,83	21,73	19,34	18,65
Sleman	9,68	9,50	9,46	8,21	8,13
Kota Yogyakarta	8,82	8,67	8,75	7,70	7,64

Sumber : BPS Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2018

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari semua kabupaten yang ada di Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi dari tahun 2013-2017. Data yang dimiliki BPS pada 2015, menunjukkan angka kemiskinan Gunungkidul hanya berselisih 0,33% lebih tinggi dengan Kulonprogo yang memiliki angka kemiskinan kedua tertinggi di Kota Yogyakarta. Adapun angkanya adalah sebesar 21,73% di Kabupaten Gunungkidul dan 21,40% di Kabupaten Kulonprogo. Dengan angka tersebut berarti menempatkan Gunungkidul sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di DIY. Dari data BPS Kota Yogyakarta tahun 2015, Kabupaten Bantul memiliki angka kemiskinan sebesar 16,33%, di Kabupaten Sleman sebesar 9,46%, dan Kota Yogyakarta memiliki angka kemiskinan sebesar 8,75%. Tingkat kemiskinan dalam pedesaan Gunungkidul lebih tinggi dibanding di perkotaan. Kondisi sumberdaya dipendesaan, biasanya dihadapkan oleh masalah kondisi tanah yang kurang subur, sedikitnya lapangan kerja, lemahnya organisasi masyarakat, ketidakmampuan masyarakat dalam menentukan harga produk pertanian yang dihasilkan, serta rendahnya mutu sumberdaya manusianya.

Dengan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015, pemerintah Kabupaten Gunungkidul memutuskan Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang dimana dengan Perda tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan yang ada di Gunungkidul. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan terdapat beberapa program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Program-program tersebut ada 3 diantaranya yaitu:

- a. “Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil”.

Dengan keluarnya Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan tersebut ternyata berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul tiap tahunnya.

Table 1.2 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah Total	Prentase
2013	238 056	152 379	21,70
2014	243 847	148 390	20,83
2015	250 630	155 000	21,73
2016	264 637	139 150	19,34
2017	277 261	135 740	18,65

Sumber : BPS Kabupaten Gunung kidul Tahun 2018

Dan dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul terbaru telah mengeluarkan data persentase penduduk miskin kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 yaitu menjadi sebesar 17,12 yang dimana turun 1,53 dari data kemiskinan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 yaitu sebesar 18,65 (<https://gunungkidulkab.bps.go.id>). Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul akan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk miskin di daerahnya agar mereka dapat hidup sejahtera, tetapi karena adanya suatu keterbatasan dan ketidakberdayaan penduduk miskin itu sendiri maka sangat sulit untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul sendiripun juga sudah berjuang terus untuk mengatasi kemiskinan di Gunungkidul. Sehingga untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul membuat beberapa kebijakan, program-program maupun strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut agar dapat terselesaikan. Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan itu berdasarkan atau berpedoman pada dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Penanggulangan Kemiskinan. Perda tersebut yang akan memayungi upaya pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dalam penanggulangan kemiskinan. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan terdapat beberapa program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

Komunikasi pemerintahan menurut (Hasan, 2014) merupakan penyampaian ide dan, program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat guna menjamin berjalannya fungsi pemerintahan dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dengan tidak merugikan pihak manapun. Dalam menjalankan Perda Nomor 2 Tahun 2015 serta program-program yang terdapat di dalamnya di butuhkan komunikasi pemerintah dalam menjalankan perda tersebut, karena dengan komunikasi pemerintah antara masyarakat dapat mewujudkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah Gunungkidul dan masyarakat sekitar agar dapat menjalankan Perda tentang Penanggulangan kemiskinan.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan tersebut telah dibuat dan program-programnya telah dilaksanakan. Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 0,69% yang pada tahun 2016 kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 19,34% dan pada tahun 2017 menurun menjadi 18,65% (BPS, 2018).

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka saya tertarik ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai program-program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Gunungkidul dalam mengatasi

kemiskinan serta komunikasi pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan program penanganan kemiskinan. Sehingga saya disini menyusun sebuah proposal penelitian yang berjudul **“Komunikasi Pemerintah Daerah Gunungkidul Dalam Menjalankan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2018”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaiman Komunikasi Pemerintah Daerah Gunungkidul dalam menjalankan program pengetasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang penaggulangan kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang peneliti ambil yaitu untuk mengetahui Komunikasi Pemerintah Daerah Gunungkidul dalam menjalankan Program pengetasan kemiskinan berbasis masyarakat Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2018.

D. Manfaat Penelitian

Untuk manfaa-manfaat dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengetahuan maupun pengalaman sebagai rujukan atau referensi dalam pembuatan kebijakan khususnya mengenai pembuatan kebijakan dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan atau pembuatan program kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan, agar peraturan atau kebijakan tersebut dapat mengatasi adanya masalah kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul.

E. Studi Pustaka

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang cukup besar yang dihadapi oleh Negara Republik Indonesia yang di karenakan angka dari kemiskinan yang sampai saat ini masih tinggi, oleh sebab itu dibutuhkan dukungan dari pemerintah dalam membuat serta menjalankan program penanganan kemiskinan agar angka kemiskinan di Negara Republik Indoseia dapat dikurangi. Penelitian seperti ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu :

No	Nama	Judul	Kesimpulan
1.	Aji Muhawarman, Dumilah Ayunigtyas, Minaniarti (2017)	Formulasi Kebijakan Komunikasi Untuk Pelaksanaan Program Pembangunan	Hasil penelitian yang telah dilakukanoelh peneliti menunjukkan hasil bahwa fungsi komunikasi yang telah dijalankan mengalami

		Kesehatan.	kemajuan yang dimana dari berjalannya komunikasi tersebut masih terdapat permasalahan baik internal maupun eksternal, unit Hubungan Masyarakat Kementerian Kesehatan dalam menjalankan fungsi komunikasi kepada masyarakat masih belum berjalan secara optimal karena belum adanya pedoman dalam menjalankan komunikasi yang akan menjadi acuan dalam mengevaluasi dan menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mengatur hal-hal yang menyangkut tentang kehumasan.
2.	Cybthia M. Bonde (2016).	Peran Komunikasi Pemerintah Dalam Pembangunan Balai Desa Makaruo Kecamatan Dumoga barat Kabupaten Bolaang Mongondow.	Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan hasil komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa masih terdapat beberapa kendala yang dimana komunikasi antara kepala desa dan sekertaris desa tidak terjalin dengan baik sehingga menyebabkan hambatan dalam pembangunan desa, akan tetapi proses pembangunan yang telah direncanakan bersama melalui komunikasi yang menjadi bagian penting dalam pembangunan balai desa Makaruo terlaksana dengan baik.
3.	Umi Chayatain dan Saudah (2016).	Model Komunikasi Pemerintah Untuk Kebijakan Akselerasi Peningkatan Status Pasar Tradisional – Modern.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah untuk kebijakan akselerasi peningkatan status pasar tradisional-modern, terlihat dari kuatnya komunikasi yang telah dibangun dengan pedagang melalui jalan musyawarah dengan mempertahankan

			komunikasi efektif dalam rangka memenuhi kebutuhan pedagang melalui kebijakan yang telah dituangkan kedalam peraturan.
4.	Mutia Dewi (2016).	Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kota Palembang Dalam Kampanye Program Palembang EMAS (Elok, Madani, Aman, Sejahtera).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang dalam kampanye program Palembang EMAS, terdiri dari dua langkah yang pertama menganalisis situasi melalui analisis tersebut akan dibuat menjadi rumusan kebijakan Palembang EMAS. Kedua setelah dilakukannya perumusan kebijakan tersebut pemerintah kota Palembang akan melakukan perencanaan program dimana dalam perencanaan tersebut akan menetapkan anggaran, SDM, dan fasilitas lainnya.
5.	Indah Sulistiani, Sumardjo, Ninuk Purnaningsih, dan Basita Ginting Sugihen (2017).	Peran Komunikasi Dalam pengembangan Energi Sosial Masyarakat Di Papua.	Hasil penelitian ini menunjukkan komunikasi program membawa pengaruh positif terhadap pengembang pengembangan energy sosial budaya masyarakat di Papua. Akan tetapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan energy sosial masyarakat masih tergolong rendah, oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kualitas komunikasi serta pihak-pihak yang berkepentingan.
6.	Syarifuddin (2014).	Komunikasi Pemerintahan dan Masyarakat Berbasis dialek Budaya Lokal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat konjo, yang

		(Studi Kasus Proses Komunikasi Penunjang Pembangunan Berbasis Dialek Konjo pada Masyarakat di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba).	dimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di pengaruhi oleh dialek konjo yang biasanya hanya dilakukan oleh komunitas suku Kajang di kabupaten Bulukumba. Komunikasi berbasis dialek Konjo di satu sisi menjadi penghalang bagi kemajuan masyarakat Kajang itu sendiri dikarenakan prinsip dari suku Kajang itu sendiri yaitu <i>Pasang ri Kajang</i> yang bermakna pesan anti modernisasi, sehingga menyebabkan masyarakat suku Kajang mencerminkan masyarakat yang kebutuhan berprestasinya rendah.
7.	Irma Nirwana Bokau (2013).	Peranan Komunikasi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Boyong Atas (Suatu Studi Kepala Desa).	Hasil penelitian ini menunjukkan komunikasi pemerintah dalam hal ini kepala desa yang dimana memiliki peranan dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, sehingga diharapkan masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam upaya pembangunan desa. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan, masih adanya partisipasi masyarakat desa Boyong Atas dalam pembangunan desa akan tetapi kepala desa kurang melaksanakan proyek pembangunan, sehingga ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa Boyong Atas menjadi kurang. Kurangnya informasi dari kepala desa Boyong Atas kepada masyarakat menyebabkan pembangunan di

			desa Boyong Atas menjadi lambat, sehingga di harapkan kepala desa memperhatikan komunikasi pemerintahan agar dapat menggerakkan proyek pembangunan di desa Boyong Atas.
8.	Kirana Kawengian, Elfie Mingfkid, dan Julia T. Pantow (2017).	Peranan Komunkasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Bersih Kampung (Studi Pada pemerintah Desa Lopan Satu Kecamatan Amurang Timur.	Hasil dari penelitian ini melihatkan peranan pemerintah dalam pelaksanaan program bersih kampung, serta pentingnya komunikasi dalam menjalankan program tersebut, adapun media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan program bersih kampung kepada masyarakat adalah dengan pedekatan komunikasi kelompok, interpersonal, persuasive dan pedekatan instruktif, sementara pedekatan menggunakan komunikasi masa belum dioptimalkan. Dalam menjalankan program bersih kampung di desa Lopana Satu terdapat hambatan yaitu terdapat beberapa masyarakat yang masih belum berpartisipasi dalam kegiatan bersih kampung, serta kendala cuaca yang tidak dapat dipastikan, serta masih belum baiknya menyampaikan program kepada masyarakat yang masih belum optimal.

Berdasarkan dari delapan jurnal di atas, dapat dilihat memiliki kesamaan mengenai komunikasi pemerintah akan tetapi perbedaan perbedaan yang ada dari delapan jurnal tersebut yaitu pada program yang diteliti berdeda satu dengan yang lainnya. Dalam hal tersebut penelitian ini juga membahas mengenai komunikasi

pemerintahan akan tetapi hanya berbeda dengan programnya saja. Karena dalam penelitian ini Program yang akan dibahas adalah Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulanga Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Teori Komunikasi Pemerintah

Komunikasi pemerintahan yang dimana pemerintah yang berperan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikannya, dalam beberapa hal juga pemerintah dapat menjadi sebagai penampung ide atau gagasan yang diinginkan oleh masyarakat dan masyarakat juga dapat berada diposisi sebagai penyampai ide atau gagasan kepada pemerintah. Dengan demikian pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan gagasan serta ide yang telah disampaikan oleh masyarakat.

Komunikasi pemerintahan menurut Erlina Hasan merupakan penyampaian beberapa ide, gagasan, program, yang telah dibuat pemerintah kepada masyarakat guna menjamin berjalannya fungsi pemerintahan dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dengan tidak merugikan pihak manapun (Hasan, 2014).

Komunikasi pemerintahan menurut (Abidin, 2016) adalah arus penyampaian dan penerimaan yang dilakukan berdasarkan aturan formal.

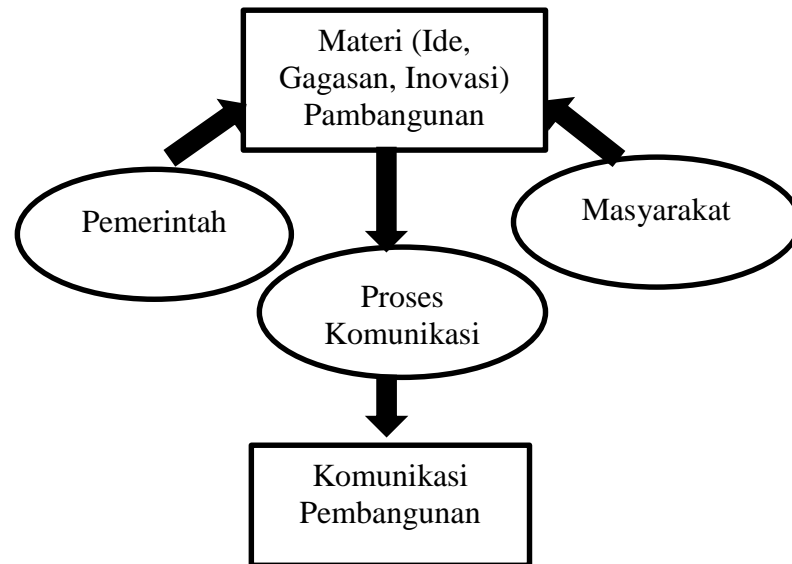
Pesan berupa informasi, ide, instruksi atau perasaan yang berhubungan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah.

Komunikasi pemerintahan menurut model Lasswell yaitu komunikasi yang ditunjukkan kepada siapa, dan berpengaruh apa kepada komunikasi. Dimana terdapat beberapa elemen yang terdapat pada model Lasswell yaitu siapa pembicara, terdapat pesan, saluran atau medium, siapa audience dan efek yang ditimbulkan (Abidin, 2016).

Komunikasi adalah suatu yang penting dalam menjalankan sebuah organisasi pemerintahan karena tanpa komunikasi, pemerintahan tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Jika dikaitkan komunikasi pemerintahan dengan komunikasi pembangunan, pemerintah selaku pembuat kebijakan maka diperlukan adanya keselarasan komunikasi agar program untuk pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Menurut Peterson dalam, (Dilla, 2012) komunikasi pembangunan adalah usaha pembangunan yang terorganisir yang dimana menggunakan proses komunikasi serta media untuk meningkatkan perekonomian serta taraf sosial, yang dimana sering terjadi di Negara berkembang.

Bagan 1.1 Jalur Komunikasi Pembangunan



Sumber : Sumandi Dilla (2012)

1.2. Elemen Proses Komunikasi Pemerintahan

Proses komunikasi pemerintahan memiliki elemen-elemen yang akan mempermudah dalam memahami dan mengerti proses komunikasi pemerintahan. Dalam komunikasi pemerintahan menunjukkan sebuah proses pengiriman dan penerimaan pesan. Gordon dalam (Abidin, 2016) mengatakan aktivitas komunikasi pemerintahan berdasarkan elemen inti yaitu mengapa, dari siapa, tentang apakah itu, kapan, bagaimana dan melalui saluran yang mana. Komunikasi pemerintahan bertujuan untuk merubah pemahaman, perilaku birokrasi, masyarakat, dan sikap.

1.3. Komponen dan Model Komunikasi Pemerintahan

Model Komunikasi sebagai proses sederhana untuk memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dan komponen lainnya. Model

komunikasi menurut Harold Lasswell dalam (Abidin, 2016) dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan 1.2 Model Komunikasi Lasswell



Sumber : Yusuf Zainal Abidin (2016 : 232)

Penjelasan komponen-komponen komunikasi pada bagan diatas dalam proses komunikasi dari model komunikasi Lasswell dalam (Abidin, 2016) adalah sebagai berikut :

- a. Pengirim pesan : orang atau individu yang mengirimkan pesan.
- b. Pesan : Yaitu orang yang memiliki informasi mengirimkan informasi kepada penerima pesan, pesan tersebut dapat berupa nonverbal maupun verbal.
- c. Saluran/Media : Yaitu jalan yang akan dilalui sebuah informasi atau pesan yang diberikan pengirim informasi kepada penerima informasi.
- d. Penerima Pesan : Yaitu orang yang menerima informasi atau pesan yang telah dikirimkan.
- e. Umpan Balik : Tanggapan atau respon terhadap suatu pesan yang diterima yang dikirimkan kepada pengirim pesan.

Pada penelitian ini memakai model komunikasi Lasswell karena lebih relevan dengan topik penelitian yang dimana komponen-komponen yang ada diatas menjadi unsur penting dalam sebuah komunikasi.

1.4. Hambatan Dalam Komunikasi Pemerintahan

Dalam melakukan sebuah komunikasi tidak akan selalu berjalan lancar dan mudah pasti akan ada sebuah hambatan sama halnya dalam melakukan komunikasi pemerintahan pasti akan sering terjadi hambatan dalam proses pelaksanaannya. Menurut Simon, Smithbrugh dan Thomson dalam (Abidin, 2016) terdapat 7 tipe rintangan dalam komunikasi pemerintahan yang dianggap krisis oleh organisasi pemerintahan. Tujuh tipe rintangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan Bahasa

Masalah penggunaan bahasa merupakan adanya perbedaan budaya, tingkat pendidikan, serta cara penyampaiannya. Sehingga, informasi yang didapatkan akan sulit untuk dipahami atau sering disalahinterpretasikan.

2. Pemberian Penafsiran

Masalah pemberian penafsiran merupakan penerima komunikasi memberikan respon yang tidak sesuai atau berbeda dengan pesan yang seharusnya diperoleh, sehingga persepsi informasi akan berbeda di antara individu.

3. Perbedaan Status

Masalah perbedaan status berkaitan dengan status yang dimana penyampain komunikasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi yang

dimana komunikasi berjalan ke atas atau ke bawah melalui berbagai tingkat hirarkis.

4. Jarak Geografis

Masalah jarak geografis merupakan adanya jarak antara komunikator dan komunikan sehingga menyulitkan dalam memberikan sebuah pesan atau informasi, akan tetapi masalah ini dapat diatasi dengan perkembangan teknik dan teknologi komunikasi.

5. Ketidaksediaan Seseorangan Memberikan Informasi

Masalah ketidaksediaan merupakan keteidaksediaan seseorang memberikan atau menerima informasi yang dimana akan menjadi hambatan dalam proses komunikasi.

6. Tekanan-Tekanan

Masalah tekanan merupakan adanya tekanan dari berbagai kelompok kerja yang dimana ini akan menjadi penyebab terjadinya kesulitan dalam memberikan atau menerima informasi .

7. Pembatasan

Masalah pembatasan merupakan hanya dapat menjangkau pihak-pihak yang memiliki informasi, dan menghalangnya dari jangkauan pihak yang seharusnya menggunakannya.

2. Teori Kemiskinan

2.1. Pengertian Kemiskinan

Secara umum kemiskinan dapat diartikan sebagai kurangnya pendapatan yang diterima atau dimiliki oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau dasar. Kemiskinan yaitu merupakan standar kehidupan yang rendah, yang dimana terjadinya kekurangan materi pada beberapa orang atau segolongan orang dibandingkan standar kehidupan yang terjadi dimasyarakat umum yang bersangkutan (Abu, 2009). Mereka dapat dikatakan miskin yaitu ketika mereka tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya baik berupa kebutuhan ekonomi, pangan, dan kesehatan. Dalam masyarakat berkembang istilah kemiskinan selalu melekat dan begitu populer karena masih banyaknya orang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Istilah kemiskinan ini memang sangat mudah diucapkan tetapi begitu mudah untuk menentukan yang miskin itu yang seperti apa dan siapa yang tergolong sebagai penduduk miskin.

Selain itu, di dalam bukunya (Suyanto, 2013) ada banyak sekali pengertian kemiskinan menurut beberapa para ahli diantaranya yaitu:

“Levitan (1980) : mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.

Schiller (1979): kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas.

Friedman (1979): kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial.

Sajogyo: kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada dibawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi”.

2.2.Ciri-ciri Kemiskinan

Pada dasarnya menurut (Suyanto, 2013) ciri-ciri kemiskinan yaitu:

Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan pada dasarnya tidak memiliki modal ataupun keterampilan untuk membuat usaha, tidak memiliki tanah yang cukup, dan faktor produksi sendiri. Dari masalah tidak adanya faktor produksi yang dimiliki menyebabkan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat sulit.

Mereka pada umumnya tidak mempunyai pendapatan sendiri sehingga menyebabkan tidak cukupnya untuk memperoleh tanah untuk digarap ataupun modal untuk membangun sebuah usaha. Serta tingkat pendidikan yang umumnya rendah di golongan miskin menjadi salah satu faktor juga.

Masih banyaknya diantara mereka yang tinggal didaerah pedesaan yang dimana masih ada beberapa dari mereka yang tidak memiliki tanah garapan atau kalau pun ada tanah tersebut relative kecil. Pada umum pekerjaan yanag mereka lakukan menjadi pekerja kasare atau pun menjadi buruh tani.

Masih banyaknya diantara mereka yang berusia muda telah memasuki ibu kota atau telah hidup disana akan tetapi mereka masih belum memiliki skil, keterampilan, dan pendidikan yang tinggi. Sedangkan di kota yang dimana negaranya masih berkembang masih belum siap untuk menampung gerakkan urbanisasi penduduk desa tersebut.

2.3.Penyebab Kemiskinan

Menurut (Suyanto, 2013) faktor yang melatarbelakangi, akar penyebab kemiskinan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang ditimbulkan karenanya langka dan kurangnya sumber daya atau dikarenakan oleh teknologinya yang masih rendah.

Kemiskinan buatan terjadi dikarenakan oleh struktur sosial yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki kemampuan atau keahlian untuk menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas lainnya.

G. Definisi Konseptual

1. Komunikasi Pemerintah

Komunikasi pemerintahan yang dimana pemerintah yang berperan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikannya, dalam beberapa hal juga pemerintah dapat menjadi sebagai penampung ide atau gagasan yang diinginkan oleh masyarakat dan masyarakat juga dapat berada diposisi sebagai penyampai ide atau gagasan kepada pemerintah.

2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki penghasilan yang cukup, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dikarenakan faktor perekonomian yang sulit.

H. Definisi Operasional

Indikator-indikator yang akan dianalisa dan dijadikan acuan dalam melakukan pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Pengirim Pesan/Komunikator (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul).
2. Pesan
 - a. Informasi
 - b. Data
 - c. Dapat dibuktikan/nyata

3. Media
 - a. Media Cetak
 - b. Media Elektronik
 - c. Media Siber
4. Penerima Pesan/Komunikan
5. Hambatan/Kendala
 - a. Penggunaan Bahasa
 - b. Pemberian Penafsiran
 - c. Perbedaan Status
 - d. Jarak Geografis
 - e. Ketidaksediaan Seseorangan Memberikan Informasi
 - f. Tekanan-Tekanan
 - g. Pembatasan
6. Umpan Balik/Feedback
 - a. Respon
 - b. Tanggapan atau reaksi
 - c. Saran

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan secara terencana, sistematis atau jalan untuk memperoleh jawaban pemecahan masalah terhadap segala permasalahan dan cara yang

digunakan untuk oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, dapat berupa wawancara, ataupun dokumentasi.

Menurut (Yusuf, 2014) penelitian kualitatif dapat dikatakan memiliki tujuan untuk menjawab sebuah fenomena yang terjadi ataupun pertanyaan yang muncul dengan menggunakan sebuah prosedur ilmiah melalui cara yang sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Sedangkan menurut (Corbin, 2003) penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang datanya tidak diperoleh melalui prosedur statistic ataupun berupa hitungan lainnya. Sekalipun begitu dari hasil penelitian kualitatif ini masih memungkinkan untuk dianalisis melalui perhitungan.

Sehingga peneliti mengambil penelitian kualitatif yang pada hakekatnya penilitain kualitatif merupakan penelitian riset yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Dalam metode penelitian kualitatif peneliti juga menggunakan metode pendekatan, serta menganalisa suatu permasalahan komunikasi pemerintah daerah Gunungkidul dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2018 dengan cara mewawancarai narasumber yang terlibat langsung dalam proses berjalannya program tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif,

sehingga data yang didapat akan lebih akurat, mendalam, dan bermakna sehingga tujuan yang ingin dicapai penulis dapat tercapai.

2. Unit Analisis

Unit Analisis merupakan objek nyata yang akan diteliti sesuai dengan permasalahan yang ada didalam penelitian. Dimana penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Gunungkidul, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, menurut (Moleong, 2010) merupakan informasi/data mengenai konsep penelitian yang telah di peroleh secara langsung dengan melakukan wawancara. Untuk mendapatkan data primer, bisa dilakukan dengan wawancara kepada pihak yang terlibat dalam penelitian, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul.
- b. Data sekunder, menurut (Sugiono, 2014) yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari buku, laporan, catatan, ataupun dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Gunungkidul provinsi D.I Yogyakarta, yaitu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, pertanyaan ini akan dilakukan kepada orang yang menjadi unit analisis penelitian yang dianggap memiliki data mengenai unit analisis penelitian. Wawancara akan dilakukan di pemerintah Kabupaten GunungKidul, yaitu di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul yaitu Bapak Subiyantoro, SIP selaku Kepala Bidang Pemberdayaan masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul yaitu Bapak Hadi Hendro Prayoga, S.IP. selaku Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan, Ibu Sumarti dan Bapak Agus selaku masyarakat yang mengikuti program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

b. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data ataupun catatan-catatan penting yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan sehingga data yang diperoleh menjadi sah, lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan saja melainkan dari mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data, foto, surat kabar, serta catatan lapangan seperti Perda Penanggulangan Kemiskinan di kabupaten Gunungkidul, dan data jumlah kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis, dari data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan, dengan cara memasukkan data ke dalam kategori serta menjabarkannya. Adapun komponen utama dalam proses analisis ini meliputi reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

(Sutopo, 2002) berpendapat bahwa “Reduksi data adalah bagian dari proses analisis, yang mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan”.

b. Penyajian Data

Alur penting dari kegiatan analisis data penyajian data. Menurut (Huberman, 2007) “penyajian itu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan”.

Penyajian data dapat berupa rakitan dari sebuah organisasi informasi yang memungkinkan untuk membuat kesimpulan riset dapat dilakukan. Sajian data dapat berupa, gambar, matriks atau skema, table. Semuanya disusun secara teratur untuk mempermudah pemahaman informasi.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan diperoleh bukan hanya sampai pada akhir pengumpulan data, melainkan suatu verifikasi yang berupa penaggulangan dengan melihat kembali field note (data mentah) agar kesimpulan yang diambil lebih kuat dan bias dipertanggung jawabkan.

Komponen utama tersebut merupakan suatu rangkaian dalam proses analisis data yang satu dengan yang satu dengan yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan, dimana komponen yang satu merupakan langkah menuju komponen yang lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif tidak bisa mengambil salah satu komponen saja. Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian yang tidak dapat terpisahkan dari proses sebelumnya, karena merupakan satu kesatuan.